

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Nurul dan Ng. Philipus. 2004. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada.
- Aji et. al. 2011. *Model Pengurangan Kemiskinan di Desa-desa Sekitar Hutan: Pengembangan Social Forestry di Jawa Barat dan Lampung*. Makalah Rekomendasi Kebijakan. Program Penelitian Kompetitif-Sub Program Critical and Strategic Social Issues LIPI, Jakarta.
- Allison, G.T. 1978. *Bureaucratic Power In National Politics*. Vol 159-178. Boston: Little, Brown and Co.
- Arief, A. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta.
- Awang, S. A. 2000. Hutan Desa : Peluang Strategi dan Tantangan. *Jurnal Hutan Rakyat Volume 3*. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Kanisius.
- Bakker, L., dan Moniaga, S. (2010). Land Claims and the Law in Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 38, 187–203.
- Banowati. 2001. *Agrosilvikultur dan Peningkatan Pendapatan Pesanggem*. Thesis. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.
- Barr, C., Resosudarmo, I. A. ., Dermawan, A., & McCarthy, J. 2006. *Decentralization of Forest Administration in Indonesia*. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research.
- Basri, Seta. 2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Inside Book Center.
- Budiman, A., Senoaji, G., Apriyanto, E. 2018. Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Perambah Dan Perubahan Penutupan Lahan Kawasan Hutan Produksi Air Sambat Reg 84 Di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu. *Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*. 7(2):71-78.
- Dahl, R. A. 1957. *The Concept of Power, Behavioral Science*.
- Departemen Kehutanan. 1999. *Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Dephut. Jakarta.
- Devkota, R. R. 2010. *Interests and Power as Drivers of Community Forestry: A Case Study of Nepal*. Universitas Gottingen, Gottingen.
- Dunggio I, dan Gunawan H. (2009). Telaah Sejarah Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 06: 01.
- Easton, David. 1992. *Approaches to The Study of Politics*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Fatchan. 2011 . *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Jengjala Pustaka Utama.

- Frida M., H. Walangitan, dan W. Tilaar. 2016. *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*. Volume 22 No. 2 Juni 2016. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemkab. Bolaang Mongondow Timur. Fakultas Pertanian Unsrat Manado.
- Fukuyama, F. 1995. *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. New York: Free Press.
- Geddes, B. 1994. *Politician's Dilemma: Building State Capacity In Latin America*. Los Angeles: University of California Press.
- Hasanudin, Lili. 1996. "Hutan Tanaman Industri : Blunder Kedua Kebijakan Kehutanan di Indonesia" dalam *Kertas Posisi (Position Paper) Walhi-No.04*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia-Friends of the Earth (FoE) Indonesia.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Irawanto, Dhedhi. 2013. *Konstruksi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Multistakeholder di Kabupaten Jombang*. Jejaring Administrasi Publik. Th. V. Nomor 2. Juli-Desember 2013. Magister Kebijakan Publik. Departemen Administrasi. FISIP UNAIR.
- Jariyah, N.A. 2018. Daya dukung lahan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Gombong. *Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. 2(1) : 35-41.
- Kartono, Kartini. 1989. *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.632/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2016 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Untuk Hutan Pendidikan dan Pelatihan Universitas Gadjah Mada, di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur Seluas 10.901
- Krott, M. 2005. *Forest Policy Analysis*. Netherlands: Springer.
- Krott, M. et al. 2014. Actor-centred power : The driving force in decentralised community based forest governance. *Forest Policy and Economics*, 49, 34–42.
- Kusdamayanti. 2008. Peran Masyarakat Dalam Penyusunan Kebijakan Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan Di Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*. 5 (2): 111–124.

- Kuswanto, Hendarto. 2003. *Teknologi Pemrosesan Pengemasan dan Penyimpanan Benih*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mackinnon, J. et. al. 1990. *Pengelolaan Kawasan Yang Dilindungi di Daerah Tropika*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mandang, I.C. 2018. Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Di Kawasan Hutan Lindung Gunung Soputan Kphp Unit V Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Agrisocioekonomi Unsrat*. 14(3):1-16.
- Maryudi, A. et. al. 2015. *Complex Regulatory Frameworks Governing Private Smallholder Tree Plantations in Gunungkidul District, Indonesia*. *Forest Policy and Economics*, 59, 1–6.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Miyata S., M.Minot, D.Hu. 2009. Impact of Contract Farming on income: Linking Small farmers, packers, and supermarkets in China. *World Development* 37(11):1781-1790.
- Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake.
- Mumbunan, S. et. al. 2015. *Menggagas Mekanisme Pembagian Manfaat (Benefit Sharing Mechanism) Terpadu untuk Konservasi Hutan Adat di Bungo, Jambi*. Jambi.
- Munggoro, D.W. dan Aliadi, A. 1999. *'Community Forestry Dalam Konteks Perubahan Institusi Kehutanan (Kembalikan Hutan Kepada Rakyat)'*. Bogor: Pustaka LATIN.
- Nandini, R., Kusumandari, A., Gunawan, T., Sadono, R. 2019. Perubahan Kualitas Lingkungan Pada Hutan Kemasyarakatan Di Daerah Aliran Sungai Babak, Pulau Lombok. *Jurnal Faloak*. 3(1):43-50.
- Nawir A.A., dan L. Santoso. 2005. Mutually beneficial company-community partnerships in plantation development: emerging lessons from Indonesia. *International Forestry Review* 7 (3).
- Nordberg, M. 2007. *Ukraine reforms in forestry 1990–2000*. *For Policy Economic* 9:713–729.
- Nugroho, A.F., Ichwandi, I. dan Kosmaryandi, N. 2017. Analisis pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus. *Journal of Env. Engineering & Waste Management*. 2(2) : 51-59.
- Peluso, N.L. 2006. *Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumber Daya dan Perlawanan di Jawa*. Konphalindo. Jakarta.

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.15/Menlhk/Setjen/kum.1/5/2018 tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penelitian dan Pengembangan, Serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.
- Reich, M.R. 1995. *The politics of health sector reforms in developing countries: Three cases of pharmaceutical policy*. Health Policy, 32, 47–77.
- Ribot, J. C., dan Peluso, N. L. 2003. A Theory of Access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181.
- Robbins, S. P., dan Judge, T. A. 2006. *Perilaku organisasi*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta. PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Salim, H.S. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sardjono, M.A. 1998. *Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan di Kaltim: Analisis Krisis Implementasi dan Perspektif ke Depan*. Lokakarya Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Samarinda 21-22 Oktober 1998.
- Sinabutar, F. 2015. *Penataan tenurial dan peran para pihak dalam mewujudkan legalitas dan legitimasi kawasan hutan negara*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sulistiyani, Ambar. 2007. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta, Gava Media.
- Sutaryono. 2008. *Pemberdayaan Setengah Hati: Sub Ordinasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan*. Yogyakarta. Laperapustaka dan STPN.
- Suyastiri, N.M. 2008. Diversifikasi Konsumsi Pangan Pokok Berbasis Potensi Lokal Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Pedesaan Di Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Kajian Ekonomi Negara Berkembang*. 13 (1): 51-60.

- TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Tuti H. et. al.. 2010. Analisis Respon Pemangku Kepentingan di Daerah Terhadap Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor. Vol. 7 No. 1, April 2010 : 13 – 25.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wakka, A.K. dan Bisjoe, A.K.H. 2018. Peningkatan modal sosial masyarakat dalam penyelesaian konflik melalui mediasi: kasus KHDTK Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 15(2) : 79- 92.
- Winarwan, Deddy. 2011. Kebijakan Pengelolaan Hutan, Kemiskinan Struktural dan Perlawanan Masyarakat. *Jurnal Kawistara*. Vol.1 No. 3, Desember 2011. hal 213-224.
- Yansen, TP. 2013. *Gerakan Desa Membangun*. Malang, Danar Wijaya.
- Yuwono, Teguh dan Putro, Wiyono T. 2008. *Cooperative Forest Management*. Yogyakarta : Datamedia.